

KONSISTENSI TARGET PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2026
KABUPATEN PURBALINGGA

FORM 2

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM RPJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
01.		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	619,913,810,250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	625,114,355,000	5,200,544,750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01.	02.	Program Pengelolaan Pendidikan	APS 7-15 Tahun	98.67	persen	136,318,570,500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS 7-15 Tahun	98.67	persen	151,947,495,000	15,628,924,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			APS 5-6 Tahun	93.36	persen			APS 5-6 Tahun	93.36	persen			
			APS Kesetaraan	20.32	persen			APS Kesetaraan	20.32	persen			
01.	03.	Program Pengembangan Kurikulum	Nilai Pengelolaan Kurikulum SD dan SMP	75.80	persen	240,400,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai Pengelolaan Kurikulum SD dan SMP	75.80	persen	240,400,000	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01.	04.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Disitribusi Guru (SD dan SMP)	41	persen	345,846,900	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Disitribusi Guru (SD dan SMP)	41	persen	118,538,000	(227,308,900)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02.		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	368,009,646,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	370,855,383,693	2,845,736,793	DINAS KESEHATAN
			Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	100	persen			Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	100	persen			
02.	02.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Faskes Primer (FKTP) dan FKRTL milik pemerintah daerah dengan SPA kesehatan sesuai Standar	100	persen	102,488,533,488	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes Primer (FKTP) dan FKRTL milik pemerintah daerah dengan SPA kesehatan sesuai Standar	100	persen	78,781,615,686	(23,706,917,802)	DINAS KESEHATAN
			Persentase Rumah Sakit Kab/Kota dengan CFR Direct Obstetric (eklamsi & Perdarahan Postpartum) < 1% RIBK	100	persen			Persentase Rumah Sakit Kab/Kota dengan CFR Direct Obstetric (eklamsi & Perdarahan Postpartum) < 1% RIBK	100	persen			
			Angka Kematian Bayi (AKB)	11.2	per 1.000 KH			Angka Kematian Bayi (AKB)	11.2	per 1.000 KH			
			Cakupan penerima kesehatan gratis	36	persen			Cakupan penerima kesehatan gratis	36	persen			
			Prevalensi Stunting	19	persen			Prevalensi Stunting	19	persen			
			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99.5	persen			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99.5	persen			
			Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana	100	persen			Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana	100	persen			
			Persentase desa/kelurahan memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	41	persen			Persentase desa/kelurahan memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	41	persen			
			Persentase fasyankes yang terintegrasi SIKN	50	persen			Persentase fasyankes yang terintegrasi SIKN	50	persen			
			Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal utama	93	persen			Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal utama	93	persen			
02.	03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	2.99	persen	806,808,450	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	2.99	persen	768,106,000	(38,702,450)	DINAS KESEHATAN
02.	04.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	persen	206,701,950	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	persen	196,858,500	(9,843,450)	DINAS KESEHATAN
02.	05.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100	persen	234,879,750	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100	persen	505,891,000	271,011,250	DINAS KESEHATAN
03.		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
03.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	12,172,204,800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	11,487,616,000	(684,588,800)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
03.	02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	53.72	persen	2,534,822,850	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	53.72	persen	7,439,782,000	4,904,959,150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	75	persen			Persentase Luas Oncoran Air Irigasi	75	persen			

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
03.	03.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum	96.58	persen	597,035,250	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum	96.58	persen	822,655,000	225,619,750	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
			Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	44.2	persen			Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	44.2	persen			
03.	05.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	95.41	persen	141,120,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	95.41	persen	34,400,000	(106,720,000)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	2.06	persen			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	2.06	persen			
03.	08.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	43.68	Angka	1,407,816,900	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penyelesaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	43.68	Angka	10,758,781,000	9,350,964,100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Tertib Administrasi dan Layak	53.69	persen			Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Tertib Administrasi dan Layak	53.69	persen			
03.	10.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	45.20	persen	93,500,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	45.20	persen	69,347,535,163	(24,152,464,837)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase Jalan Jabupaten dalam Kondisi Sedang	35.80	persen			Persentase Jalan Jabupaten dalam Kondisi Sedang	35.80	persen			
03.	11.	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina	37.5	persen	73,504,200	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Konstruksi yang Terbina	37.5	persen	96,263,000	22,758,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
03.	12.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	94.75	persen	1,826,263,850	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	94.75	persen	290,970,000	(1,535,293,850)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
04.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	4,579,287,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	4,354,261,500	(225,025,800)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
04.	02.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	persen	296,692,200	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	persen	282,564,000	(14,128,200)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang Memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni	100	persen			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang Memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni	100	persen			
04.	03.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Ditangani	16.08	persen	877,205,700	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh Ditangani	16.08	persen	835,434,500	(41,771,200)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
04.	04.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	37.84	persen	121,447,200	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	37.84	persen	115,664,000	(5,783,200)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
04.	05.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU Layak	72.65	persen	893,527,950	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU Layak	72.65	persen	850,979,000	(42,548,950)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
05.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	11,247,050,850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	4,441,241,000	(6,805,809,850)	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
										6,377,203,000	6,377,203,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
05.	02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Trantibum	16.00	persen	848,370,600	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Trantibum	16.00	persen	854,900,000	6,529,400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Penegakkan Perda	10.91	persen			Persentase Penegakkan Perda	10.91	persen			
05.	03.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Kebencanaan	100	persen	432,042,450	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Kebencanaan	100	persen	389,832,000	(42,210,450)	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
05.	04.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75.76	persen	389,922,750	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75.76	persen	266,748,000	(123,174,750)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Pelayanan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	100	persen			Persentase Pelayanan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	100	persen			
06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial												
06.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	6,139,719,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,580,503,000	(559,216,600)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
06.	02.	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial	61.17	persen			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial	61.17	persen	845,251,000	(42,261,500)
06.	04.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	100	persen	6,635,240,850	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	100	persen	6,319,228,000	(316,012,850)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
06.	05.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Penanganan Sosial	89.27	persen			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Penanganan Sosial	89.27	persen	2,287,411,000	(114,369,500)
06.	06.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	persen	157,679,550	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	persen	150,172,000	(7,507,550)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
06.	07.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dan Makam Leluher yang Difasilitasi Pengelolaannya	100	persen			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Makam Leluher yang Difasilitasi Pengelolaannya	100	persen	123,044,000	(6,151,150)
	Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja												
07.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,523,585,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,079,254,000	(444,331,900)	DINAS TENAGA KERJA
07.	02.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100	persen			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100	persen	3,510,000	(1,838,700)
07.	03.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja	2.48	persen	947,026,500	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja	2.48	persen	903,470,000	(43,556,500)	DINAS TENAGA KERJA
07.	04.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah	63.91	persen	860,925,200	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antarkerja Lintas Daerah	63.91	persen	358,638,000	(502,287,200)	DINAS TENAGA KERJA

No		URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
07.	05.	Program Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	89.48	Persen	498,369,900	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	89.48	Persen	474,638,000	(23,731,900)	DINAS TENAGA KERJA
08.		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
08.	02.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah	100	persen	199,316,250	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah	100	persen	102,630,000	(96,686,250)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
08.	03.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Laporan Kekerasan Perempuan yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	100	persen	135,212,700	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Laporan Kekerasan Perempuan yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	100	persen	215,970,000	80,757,300	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
08.	05.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Keterisian Data pada Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)	49.22	persen	2,265,900	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Keterisian Data pada Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)	49.22	persen	2,158,000	(107,900)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
08.	06.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pembentukan Forum Anak	5.04	persen	185,672,550	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pembentukan Forum Anak	5.04	persen	169,691,000	(15,981,550)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
08.	07.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Laporan Kekerasan Anak yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	100	persen	371,278,950	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Laporan Kekerasan Anak yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	100	persen	360,740,000	(10,538,950)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
09.		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
09.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,448,892,050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,254,991,000	(193,901,050)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
09.	02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kondisi Baik	57.14	persen	857,850	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kondisi Baik	57.14	persen	2,000,000	1,142,150	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
09.	03.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	92.12	persen	81,971,400	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	92.12	persen	86,000,000	4,028,600	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
09.	04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Pangan	1.67	persen	78,750,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Pangan	1.67	persen	50,000,000	(28,750,000)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
09.	05.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	91	persen	29,244,600	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	91	persen	16,000,000	(13,244,600)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
10.		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
10.	04.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penangan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100	persen	5,363,400	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penangan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100	persen	5,108,000	(255,400)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	06. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria	100	persen	39,900,000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria	100	persen	17,549,000	(22,351,000)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
10.	10. Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pemanfaatan Tanah Pemda (Eks-Bengkok)	93.26	persen	284,248,650	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Tanah Pemda (Eks-Bengkok)	93.26	persen	155,140,000	(129,108,650)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
11.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	10,496,732,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	9,878,089,000	(618,643,400)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup	100	persen	48,187,650	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan Hidup	100	persen	45,893,000	(2,294,650)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	100	persen	244,560,750	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pemantauan Kualitas Air dan Udara	100	persen	232,915,000	(11,645,750)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Perkotaan	4.297	persen	914,362,050	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Perkotaan	4.297	persen	870,821,000	(43,541,050)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Perusahaan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3	80.68	persen	12,594,750	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan yang Melakukan Pengelolaan Limbah B3	80.68	persen	11,995,000	(599,750)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100	persen	63,133,350	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100	persen	60,127,000	(3,006,350)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Bank Sampah yang Beroperasi	66.67	persen	16,357,950	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Bank Sampah yang Beroperasi	66.67	persen	35,498,000	19,140,050	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Ditangani oleh Pemerintah Daerah	100	persen	5,857,950	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Ditangani oleh Pemerintah Daerah	100	persen	5,579,000	(278,950)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	11. Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan Pengurangan Sampah	15.78	persen	18,980,878,800	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Pengurangan Sampah	15.78	persen	6,048,456,000	(12,932,422,800)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Cakupan Penanganan Sampah	22.87	persen			Cakupan Penanganan Sampah	22.87	persen			
12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
12.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,322,379,650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,214,866,500	(107,513,150)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12.	02. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	88.46	persen	1,127,259,000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	88.46	persen	1,012,841,000	(114,418,000)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12.	03. Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.41	persen	68,693,100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.41	persen	66,042,000	(2,651,100)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12.	04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	100	persen	771,797,950	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	100	persen	230,799,000	(540,998,950)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12.	05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Lembaga/Instansi yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan	100	persen	6,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Lembaga/Instansi yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan	100	persen	6,000,000	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
13.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,926,361,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,764,694,000	(161,667,600)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.	02. Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Kewenangan Desa	50.67	persen	8,664,600	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Kewenangan Desa	50.67	persen	3,308,252,000	3,299,587,400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.	03. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yg Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)	54.69	persen	44,166,150	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yg Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)	54.69	persen	42,083,000	(2,083,150)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No		URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM RPJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	04.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100	persen	5,085,573,500	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100	persen	3,507,943,000	(1,577,630,500)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.	05.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	98.61	persen	568,222,200	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	98.61	persen	5,662,900,000	5,094,677,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14.		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
14.	02.	Program Pengendalian Penduduk	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	19.2	angka	525,620,550	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	19.2	angka	500,594,000	(25,026,550)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14.	03.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	7.3	persen	7,956,232,200	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	7.3	persen	7,569,827,000	(386,405,200)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	34.95	persen			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	34.95	persen			
14.	04.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Keluarga yang Mengikuti Kelompok UPPKS	9.3	persen	5,510,984,850	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Keluarga yang Mengikuti Kelompok UPPKS	9.3	persen	5,256,096,000	(254,888,850)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	87.81	persen			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	87.81	persen			
15.		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan											
15.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	6,418,065,150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	6,156,322,600	(261,742,550)	DINAS PERHUBUNGAN
15.	02.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Trayek Kendaraan Umum yang Aktif	52.28	persen	13,461,183,750	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Trayek Kendaraan Umum yang Aktif	52.28	persen	12,748,252,400	(712,931,350)	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	73.46	persen			Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	73.46	persen			
16.		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
16.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	6,646,498,950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	6,281,704,500	(364,794,450)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16.	02.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik Secara Up To Date di Portal Daerah	17.34	persen	892,874,850	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik Secara Up To Date di Portal Daerah	17.34	persen	851,172,000	(41,702,850)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16.	03.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi yang Dikelola	81	persen	1,194,086,250	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi yang Dikelola	81	persen	1,137,318,000	(56,768,250)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
17.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,268,382,250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,091,860,000	(176,522,250)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	03.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	34.04	persen	81,270,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	34.04	persen	83,800,000	2,530,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	04.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kondisi Koperasi	59.66	persen	10,741,500	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kondisi Koperasi	59.66	persen	10,000,000	(741,500)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	05.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Memiliki Kompetensi Bidang Perkoperasian	19.89	persen	21,741,300	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Memiliki Kompetensi Bidang Perkoperasian	19.89	persen	24,960,000	3,218,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	06.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	21.59	persen	480,524,100	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	21.59	persen	10,000,000	(470,524,100)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD		INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM RPJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17.	07.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Bersertifikat/Berijin	2.73	persen	1,515,196,200	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang Bersertifikat/Berijin	2.73	persen	1,294,450,000	(220,746,200)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	08.	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	5.35	persen	1,450,634,850	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	5.35	persen	1,514,294,000	63,659,150	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal												
18.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,846,644,550	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	4,079,581,000	232,936,450	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18.	02.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100	persen	119,931,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100	persen	30,480,000	(89,451,000)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18.	03.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kepeminatan Investasi	100	investor	118,881,000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Kepeminatan Investasi	100	investor	39,596,000	(79,285,000)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18.	04.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92	persen	64,444,800	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92	persen	83,264,000	18,819,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18.	05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	persen	98,836,500	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	persen	140,292,000	41,455,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18.	06.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10.27	persen	7,155,750	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10.27	persen	12,920,000	5,764,250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga												
19.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,961,295,100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,773,981,500	(187,313,600)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
19.	02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Daya Saing Kepemudaan	72.22	angka	1,768,315,450	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Daya Saing Kepemudaan	72.22	angka	744,868,500	(1,023,446,950)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
19.	03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Tingkat Daya Saing Keolahragaan	40.00	persentase	5,421,808,350	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tingkat Daya Saing Keolahragaan	40.00	persentase	4,950,653,000	(471,155,350)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
19.	04.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kepramukaan Aktif	100	persen	367,500,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kepramukaan Aktif	100	persen	350,000,000	(17,500,000)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												
20.	02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3.1	angka	49,584,150	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	3.1	angka	47,225,000	(2,359,150)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Indeks Satu Data Indonesia	81	angka			Indeks Satu Data Indonesia	81	angka			
			Indeks Bhumandala	3.85	angka			Indeks Bhumandala	3.85	angka			
21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												
21.	02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (PAMINFO)	74.5	angka	33,031,950	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (PAMINFO)	74.5	angka	31,454,000	(1,577,950)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												
22.	02.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan)	8	objek	1,349,022,150	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan)	8	objek	1,284,783,000	(64,239,150)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22.	04.	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	100	persen	12,942,300	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	100	persen	12,326,000	(616,300)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22.	05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	persen	148,303,050	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	persen	141,241,000	(7,062,050)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM RPJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.	06. Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dikelola	100	persen	660,369,150	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dikelola	100	persen	628,923,000	(31,446,150)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
23.	02. Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Aktif	52	persen	850,000,000,000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Aktif	52	persen	848,915,000	(849,151,085,000)	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
23.	03. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Menemukan, Merawat dan Mengalihmediakan) yang ada di Wilayah Kabupaten Purbalingga	100	persen	47,000,000,000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan (Menemukan, Merawat dan Mengalihmediakan) yang ada di Wilayah Kabupaten Purbalingga	100	persen	43,414,000	(46,956,586,000)	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											
24.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,546,627,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	3,487,528,000	(59,099,000)	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
24.	02. Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	100	persen	224,326,000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	100	persen	35,124,000	(189,202,000)	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
24.	03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	100	persen	21,050,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	100	persen	18,050,000	(3,000,000)	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Urusan Pilihan											
25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan											
25.	03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	300	ton	26,617,500	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	300	ton	23,000,000	(3,617,500)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
25.	04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	7040	ton	487,361,550	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	7040	ton	341,000,000	(146,361,550)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
25.	06. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Ikan	2500	ton	116,607,750	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan ikan	2500	ton	123,000,000	6,392,250	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
25.	07. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	100	persen	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
26.	02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	50	persen	432,309,150	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	50	persen	411,724,000	(20,585,150)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
26.	03. Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Wisata yang Meningkatkan Angka Kunjungan Wisatanya	75	persen	96,400,500	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Wisata yang Meningkatkan Angka Kunjungan Wisatanya	75	persen	91,810,000	(4,590,500)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
26.	04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	32.07	persen	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
26.	05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	135	orang	63,430,500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	135	orang	60,410,000	(3,020,500)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
27.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	26,642,994,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	28,457,801,000	1,814,807,000	DINAS PERTANIAN
27.	02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rata-Rata (Persentase) Ketersediaan Sarana Pertanian (Traktor, Pompa Air, Combine Harvester, Power Thresher, Benih Padi)	40	persen	956,595,150	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata-Rata (Persentase) Ketersediaan Sarana Pertanian (Traktor, Pompa Air, Combine Harvester, Power Thresher, Benih Padi)	40	persen	858,543,000	(98,052,150)	DINAS PERTANIAN
27.	03. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian yang Diolah/ Dimanfaatkan	100	persen	16,088,529,450	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Pertanian yang Diolah/ Dimanfaatkan	100	persen	15,831,185,000	(257,344,450)	DINAS PERTANIAN
27.	04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prevalensi Penyakit Hewan	16.85	persen	148,450,050	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prevalensi Penyakit Hewan	16.85	persen	141,381,000	(7,069,050)	DINAS PERTANIAN
		Persentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	88	persen			Persentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	88	persen			

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27.	05. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian	62	persen	357,788,550	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian	62	persen	288,451,000	(69,337,550)	DINAS PERTANIAN
27.	07. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani (Kategori Madya dan Utama)	22.67	persen	3,809,828,400	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani (Kategori Madya dan Utama)	22.67	persen	2,930,728,000	(879,100,400)	DINAS PERTANIAN
30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
30.	02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan	100	persen	7,609,350	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan	100	persen	5,466,000	(2,143,350)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30.	03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat ber SNI	20.00	persen	2,170,911,750	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat ber SNI	20.00	persen	2,063,254,500	(107,657,250)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30.	04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas harga	± 10	persen	968,499,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga	± 10	persen	827,753,500	(140,745,500)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30.	05. Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	2,559	miliar rupiah	25,219,950	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	2,559	miliar rupiah	29,030,000	3,810,050	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30.	06. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (U TPP) bertanda tera sah yang berlaku	89.84	persen	154,934,850	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (U TPP) bertanda tera sah yang berlaku	89.84	persen	147,560,600	(7,374,250)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30.	07. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	71.27	persen	6,300,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	71.27	persen	3,000,000	(3,300,000)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
31.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11,852,188,950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,431,684,200	(420,504,750)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31.	02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	23.43	persen	1,337,213,850	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	23.43	persen	1,273,537,000	(63,676,850)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31.	03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri	100	persen	3,003,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri	100	persen	2,860,000	(143,000)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31.	04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Kenaikan Data Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional	13.64	industri	2,967,300	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kenaikan Data Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional	13.64	industri	2,826,200	(141,100)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
32.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi											
32.	03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	1	KK	4,862,550	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	1	KK	3,000,000	(1,862,550)	DINAS TENAGA KERJA
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
01.	Unsur Sekretariat Daerah											
01.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	44,508,210,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	43,152,323,000	(1,355,887,600)	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Operasional dan Fasilitas Kerumahahtangaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	persen			Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Operasional dan Fasilitas Kerumahahtangaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	persen			
		Persentase Berita yang Mendapat Respon Publik	100	persen			Persentase Berita yang Mendapat Respon Publik	100	persen			
		Persentase OPD yang Kinerja Organisasinya Kategori Sangat Baik	15.56	persen			Persentase OPD yang Kinerja Organisasinya Kategori Sangat Baik	15.56	persen			
01.	02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	98	angka	13,870,029,600	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	98	angka	12,542,403,000	(1,327,626,600)	SEKRETARIAT DAERAH
		Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	3.3	angka			Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	3.3	angka			
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang Terfasilitasi	100	persen			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan yang Terfasilitasi	100	persen			
01.	03. Program Perekonomian dan Pembangunan	Return on Aset (ROA) BUMD	2.49	persen	1,444,546,950	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Return on Aset (ROA) BUMD	2.49	persen	1,375,759,000	(68,787,950)	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang Selesai Tepat Waktu	100	persen			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang Selesai Tepat Waktu	100	persen			
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	80	angka			Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	80	angka			
02.	Unsur Sekretariat DPRD											

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	41,461,521,150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	36,487,625,000	(4,973,896,150)	SEKRETARIAT DPRD
		Cakupan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	100	persen			Cakupan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	100	persen				
02.	02.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitas Pelayanan Persidangan dan Perundang-Undangan	100	persen	21,017,625,300	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitas Pelayanan Persidangan dan Perundang-Undangan	100	persen	15,721,116,000	(5,296,509,300)	SEKRETARIAT DPRD
		Cakupan Fasilitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	100	persen			Cakupan Fasilitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	100	persen				
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 unsur)												
01.	Unsur Perencanaan												
01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,686,973,250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5,571,133,000	(115,840,250)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
01.	02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Prosedur Dokumen Perencanaan	100	persen		417,947,250	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Prosedur Dokumen Perencanaan	100	persen	367,977,000	(49,970,250)
		Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan	94.07	persen		Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan		94.07	persen				
		Tingkat Keterisian Data Pembangunan (SDI Bappenas)	85	persen		Tingkat Keterisian Data Pembangunan (SDI Bappenas)	85	persen					
01.	03.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Bbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	persen	419,766,900	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Bbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	persen	399,778,000	(19,988,900)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	persen			Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	persen				
		Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Bidang Ekonomi	100	persen		Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Bidang Ekonomi	100	persen					
		Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Ekonomi	100	persen		Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Ekonomi	100	persen					
		Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Pidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	persen		Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD dan Program Renja dengan RKPD Pidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	persen					
		Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	persen		Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	persen					
02.	Unsur Keuangan												
02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	17,127,013,050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	18,255,972,000	1,128,958,950	BADAN KEUANGAN DAERAH
02.	02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100	persen		417,123,542,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100	persen	409,141,262,942	(7,982,279,058)
		Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan	90.2	angka		Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Perbendaharaan		90.2	angka				
		Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	100	persen		Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemda	100	persen					
		Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	100	persen		Persentase Pengajuan Belanja Transfer dan BTT yang Tersalur	100	persen					

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
02.	03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	100	persen	524,879,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Tepat Waktu	100	persen	440,752,500	(84,126,500)	BADAN KEUANGAN DAERAH
02.	04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	452,321,027,093	rupiah	2,007,613,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	452,321,027,093	rupiah	1,897,546,000	(110,067,000)	BADAN KEUANGAN DAERAH
			Jumlah Objek Pajak	644,166	objek pajak			Jumlah Objek Pajak	644,166	objek pajak			
03.		Unsur Kepegawaian											
03.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	6,138,758,850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	6,054,826,000	(83,932,850)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
03.	02.	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualifikasi Aspek Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi	0.169	angka	1,184,778,000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kualifikasi Aspek Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi	0.169	angka	1,128,360,000	(56,418,000)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Indeks Kualifikasi Aspek Mutasi, Rotasi, Promosi	0.065	angka			Indeks Kualifikasi Aspek Mutasi, Rotasi, Promosi	0.065	angka			
			Indeks Kinerja dan Disiplin	0.220	angka			Indeks Kinerja dan Disiplin	0.220	angka			
			Indeks Kompetensi	0.195	angka			Indeks Kompetensi	0.195	angka			
04.		Unsur Pendidikan dan Pelatihan											
04.	02.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	100	persen	40,351,500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	100	persen	38,430,000	(1,921,500)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.		Unsur Penelitian dan Pengembangan											
05.	02.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	persen	311,524,500	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	persen	156,758,000	(154,766,500)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
05.	02.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset dan Inovasi Daerah	100	persen	500,000,000	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi Daerah	100	persen	170,000,000	(330,000,000)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 unsur)											
01.		Inspektorat Daerah											
01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	18,404,476,650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	17,272,108,000	(1,132,368,650)	INSPEKTORAT DAERAH
01.	02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	94	persen	1,566,324,900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	94	persen	1,491,738,000	(74,586,900)	INSPEKTORAT DAERAH
			Persentase Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan	100	persen			Persentase Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan	100	persen			
01.	03.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkat Setelah Pendampingan	100	persen	822,339,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Akuntabilitas Meningkat Setelah Pendampingan	100	persen	783,180,000	(39,159,000)	INSPEKTORAT DAERAH
			Persentase Unit Kerja yang Layak Diusulkan Mendapat Predikat WBK	6.52	persen			Persentase Unit Kerja yang Layak Diusulkan Mendapat Predikat WBK	6.52	persen			
		Unsur Kewilayahan (1 unsur)											
01.		Kecamatan											
01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	46,881,645,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	1,590,118,000	(45,291,527,300)	KECAMATAN BOBOTSARI
											1,804,821,500	1,804,821,500	KECAMATAN BOJONGSARI
											1,889,547,000	1,889,547,000	KECAMATAN BUKATEJA
											1,718,526,000	1,718,526,000	KECAMATAN KALIGONDANG
											3,449,155,000	3,449,155,000	KECAMATAN KALIMANAH

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										1,458,277,000	1,458,277,000	KECAMATAN KARANGANYAR
										5,533,857,000	5,533,857,000	KECAMATAN KARANGJAMBU
										1,563,216,000	1,563,216,000	KECAMATAN KARANGMONCOL
										1,665,501,000	1,665,501,000	KECAMATAN KARANGREJA
										1,616,268,000	1,616,268,000	KECAMATAN KEJOBONG
										1,467,988,000	1,467,988,000	KECAMATAN KEMANGKON
										1,515,275,000	1,515,275,000	KECAMATAN KERTANEGARA
										1,714,833,000	1,714,833,000	KECAMATAN KUTASARI
										1,951,772,800	1,951,772,800	KECAMATAN MREBET
										2,500,177,000	2,500,177,000	KECAMATAN PADAMARA
										1,992,504,000	1,992,504,000	KECAMATAN PENGADEGAN
										9,209,966,000	9,209,966,000	KECAMATAN PURBALINGGA
										1,730,852,000	1,730,852,000	KECAMATAN REMBANG
01.	02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan	100	angka	577,885,350	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan	100	angka	65,558,000	(512,327,350)	KECAMATAN BOBOTSARI
										12,600,000	12,600,000	KECAMATAN BOJONGSARI
										53,095,000	53,095,000	KECAMATAN BUKATEJA
										22,999,000	22,999,000	KECAMATAN KALIGONDANG
										28,720,000	28,720,000	KECAMATAN KALIMANAH
										21,080,000	21,080,000	KECAMATAN KARANGANYAR
										31,638,000	31,638,000	KECAMATAN KARANGJAMBU
										61,828,000	61,828,000	KECAMATAN KARANGMONCOL
										7,640,000	7,640,000	KECAMATAN KARANGREJA
										21,226,000	21,226,000	KECAMATAN KEJOBONG
										24,840,000	24,840,000	KECAMATAN KEMANGKON
										12,495,000	12,495,000	KECAMATAN KERTANEGARA
										7,888,000	7,888,000	KECAMATAN KUTASARI
										5,688,000	5,688,000	KECAMATAN MREBET
										58,729,000	58,729,000	KECAMATAN PADAMARA
										49,467,000	49,467,000	KECAMATAN PENGADEGAN
										30,830,000	30,830,000	KECAMATAN PURBALINGGA
										24,000,000	24,000,000	KECAMATAN REMBANG
01.	03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keaktifan Lembaga Desa/Kel	100	persen	5,690,183,100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keaktifan Lembaga Desa/Kel	100	persen	40,230,000	(5,649,953,100)	KECAMATAN BOBOTSARI
										34,360,000	34,360,000	KECAMATAN BOJONGSARI
										49,275,000	49,275,000	KECAMATAN BUKATEJA
										55,250,000	55,250,000	KECAMATAN KALIGONDANG
										917,294,000	917,294,000	KECAMATAN KALIMANAH

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD		INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											37,850,000	37,850,000	KECAMATAN KARANGANYAR
											40,450,000	40,450,000	KECAMATAN KARANGJAMBU
											32,540,000	32,540,000	KECAMATAN KARANGMONCOL
											26,500,000	26,500,000	KECAMATAN KARANGREJA
											34,457,000	34,457,000	KECAMATAN KEJOBONG
											29,901,000	29,901,000	KECAMATAN KEMANGKON
											45,000,000	45,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
											38,349,000	38,349,000	KECAMATAN KUTASARI
											41,508,000	41,508,000	KECAMATAN MREBET
											334,349,000	334,349,000	KECAMATAN PADAMARA
											29,328,000	29,328,000	KECAMATAN PENGADEGAN
											3,452,027,000	3,452,027,000	KECAMATAN PURBALINGGA
											19,800,000	19,800,000	KECAMATAN REMBANG
01.	04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100	dokumen	544,732,650	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	100	dokumen	26,200,000	(518,532,650)	KECAMATAN BOBOTSARI
											32,750,000	32,750,000	KECAMATAN BOJONGSARI
											10,520,000	10,520,000	KECAMATAN BUKATEJA
											24,630,000	24,630,000	KECAMATAN KALIGONDANG
											34,380,000	34,380,000	KECAMATAN KALIMANAH
											24,820,000	24,820,000	KECAMATAN KARANGANYAR
											24,800,000	24,800,000	KECAMATAN KARANGJAMBU
											20,300,000	20,300,000	KECAMATAN KARANGMONCOL
											32,200,000	32,200,000	KECAMATAN KARANGREJA
											23,885,000	23,885,000	KECAMATAN KEJOBONG
											32,000,000	32,000,000	KECAMATAN KEMANGKON
											26,200,000	26,200,000	KECAMATAN KERTANEGARA
											31,865,000	31,865,000	KECAMATAN KUTASARI
											34,870,000	34,870,000	KECAMATAN MREBET
											23,950,000	23,950,000	KECAMATAN PADAMARA
											26,936,000	26,936,000	KECAMATAN PENGADEGAN
											36,410,000	36,410,000	KECAMATAN PURBALINGGA
											34,700,000	34,700,000	KECAMATAN REMBANG
01.	05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	100	persen	415,456,650	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	100	persen	13,140,000	(402,316,650)	KECAMATAN BOBOTSARI
											30,759,500	30,759,500	KECAMATAN BOJONGSARI
											14,927,000	14,927,000	KECAMATAN BUKATEJA
											35,328,000	35,328,000	KECAMATAN KALIGONDANG
											19,179,000	19,179,000	KECAMATAN KALIMANAH

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD		INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											24,975,000	24,975,000	KECAMATAN KARANGANYAR
											32,000,000	32,000,000	KECAMATAN KARANGJAMBU
											20,440,000	20,440,000	KECAMATAN KARANGMONCOL
											30,000,000	30,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
											20,125,000	20,125,000	KECAMATAN KEJOBONG
											13,211,000	13,211,000	KECAMATAN KEMANGKON
											31,000,000	31,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
											26,561,000	26,561,000	KECAMATAN KUTASARI
											18,467,000	18,467,000	KECAMATAN MREBET
											25,000,000	25,000,000	KECAMATAN PADAMARA
											4,550,000	4,550,000	KECAMATAN PENGADEGAN
											23,294,000	23,294,000	KECAMATAN PURBALINGGA
											14,000,000	14,000,000	KECAMATAN REMBANG
01.	06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100	persen	66,470,250,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100	persen	3,720,000	(66,466,530,000)	KECAMATAN BOBOTSARI
											7,240,000	7,240,000	KECAMATAN BOJONGSARI
											1,000,000	1,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
											10,743,000	10,743,000	KECAMATAN KALIGONDANG
											500,000	500,000	KECAMATAN KALIMANAH
											300,000	300,000	KECAMATAN KARANGANYAR
											100,000	100,000	KECAMATAN KARANGJAMBU
											4,000,000	4,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
											-	-	KECAMATAN KEJOBONG
											9,267,000	9,267,000	KECAMATAN KEMANGKON
											11,050,000	11,050,000	KECAMATAN KUTASARI
											5,700,200	5,700,200	KECAMATAN MREBET
											1,500,000	1,500,000	KECAMATAN PADAMARA
											6,150,000	6,150,000	KECAMATAN PENGADEGAN
											1,000,000	1,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
											14,000,000	14,000,000	KECAMATAN REMBANG
	Unsur Pemerintahan Umum (1 unsur)												
01.	Kesatuan Bangsa dan Politik												
01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	2,651,508,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	2,681,422,000	29,913,700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01.	02.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk yang Memperoleh Pendidikan Wawasan Kebangsaan	0.5	persen	632,773,050	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penduduk yang Memperoleh Pendidikan Wawasan Kebangsaan	0.5	persen	532,641,000	(100,132,050)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01.	03.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Penduduk yang Memperoleh Pendidikan Politik	3.58	persen	2,060,452,800	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Penduduk yang Memperoleh Pendidikan Politik	3.58	persen	2,018,235,000	(42,217,800)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	URUSAN / PROGRAM RPJMD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PRJMD (Rp)	URUSAN / PROGRAM RKPD	INDIKATOR PROGRAM RPJMD	TARGET	SATUAN	PAGU PROGRAM PKPD (Rp)	SEGISIH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. 04.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Melaporkan Kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	33.78	persen	725,100,600	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Melaporkan Kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	33.78	persen	568,050,000	(157,050,600)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01. 05.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	26.04	per 10.000 penduduk	172,242,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	26.04	per 10.000 penduduk	166,040,000	(6,202,000)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01. 06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Terpantau	50	potensi	846,006,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Terpantau	50	potensi	815,720,000	(30,286,000)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Purbalingga, 17 Juni 2025
Pir. Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Purbalingga
Drs. SUROTO, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

